

## DIPLOMASI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM UPAYA MENGHADAPI MASALAH GLOBAL TERKAIT KELOMPOK MILITAN ISIS

Faustina Tamisari

Program Studi Ilmu Politik – Konsentrasi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
Jl. Bukit Dago Utara No.25 Bandung  
e-mail: [faustina.tamisari@gmail.com](mailto:faustina.tamisari@gmail.com)

### Abstract

*Post 9/11 tragedy, the which is Considered as a defining moment for the threat of terrorism today, many things have been done by countries - Including Indonesia, to eradicate and end the terror. The threat has been escalated and spreaded Widely to Southeast Asia. As a country that is still growing, Indonesia has a national interest, one of the which is to maintain the stability of Southeast Asia - because of the stability of this region is one of the external factors that Affects the national security and stability of Indonesia itself. Maintaining the stability of one of them is through diplomacy, soft power or smart power precisely to prevent the values and ideologies of radical group, ISIS, to not enter and Widely spread in Indonesia. The Indonesian government needs to perceive from the strategic perspectives of foreign policy, not only in terms of domestic only. Preventive efforts undertaken by Indonesia not only in the domestic alone but must pay attention to external factors as well as through its foreign policy.*

**Keywords:** terrorism, diplomacy, foreign policy, soft power, smart power, militant, ISIS

---

### Abstrak

Setelah peristiwa 9/11 yang merupakan suatu *defining moment* bagi awal mulanya ancaman tindakan terorisme yang berkembang saat ini, sudah banyak kiat-kiat yang dilakukan berbagai negara – termasuk Indonesia, untuk dapat menghentikan tindakan tersebut. Tindakan teror ini sudah semakin berkembang dan meluas hingga Asia Tenggara. Sebagai negara yang masih terus berkembang, Indonesia memiliki kepentingan nasional, salah satunya adalah, untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara – karena kestabilan kawasan ini menjadi salah satu faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi keamanan dan kestabilan nasional Indonesia itu sendiri. Menjaga stabilitas tersebut salah satunya adalah dengan melalui diplomasi *soft power* atau justru *smart power* untuk mencegah supaya nilai-nilai radikal kelompok ISIS tidak masuk dan menyebar luas di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melihat dari segi persoalan strategis kebijakan luar negeri, bukan hanya dari segi domestik saja. Persiapan upaya preventif yang dilakukan Indonesia tidak hanya dalam domestik saja tetapi harus memperhatikan faktor eksternalnya juga melalui kebijakan luar negerinya.

**Kata Kunci:** terorisme, diplomasi, kebijakan luar negeri, *soft power*, *smart power*, militan, ISIS

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Negara sebagai aktor utama dalam studi Hubungan Internasional, masing-masing memiliki kepentingan nasionalnya sendiri yang berbeda-beda, dan memiliki tanggung jawab untuk dapat mempertahankan keamanan negaranya beserta masyarakatnya. Salah satu konsep yang tidak akan pernah terlepas dari pembahasan Hubungan Internasional adalah

masalah keamanan. Cakupan luas konsep keamanan itu sendiri dapat dibagi menjadi keamanan nasional, keamanan internasional, dan bahkan sekarang konsep yang lebih luas lagi, yakni keamanan global. Keamanan dalam disiplin Hubungan Internasional merupakan konsep yang paling penting – terutama jika dikaitkan dengan pendekatan *Realisme*. Penganut paham Realisme berkeyakinan bahwa keamanan merupakan hal yang paling

utama, sebagai sesuatu bersifat primer – sedangkan di luar keamanan merupakan hal sekunder. Salah satu peneliti CSIS, Rizal Sukma, dalam paparannya pada seminar Keamanan di Bali, mengemukakan bahwa tatanan dunia (*World Order*) kerap kali berubah ketika terjadi suatu hal yang disebut sebagai *defining moment*. Misalnya dengan perang dingin yang berakhir seiring dengan runtuhnya tembok Berlin, dan juga bubarnya Uni Soviet sebagai *defining moment*<sup>1</sup> awal mulanya terjadi tindakan terorisme global, dan ketika perang dingin berakhir, isu-isu non-tradisional mulai banyak muncul dan menarik perhatian, salah satunya terorisme.

Tindakan terorisme yang mengguncang dunia pertama kali dan menjadi perhatian adalah peristiwa yang kita kenal betul dengan istilah 9/11, runtuhnya gedung Pentagon dan *World Trade Center* (WTC), dalam pandangan beberapa pihak, menjadi *defining moment* dari berakhirnya perang dingin dan titik awal kegiatan terorisme mulai berkembang dan menjadi fokus beberapa ahli di berbagai belahan dunia.<sup>2</sup> Sebagaimana serangan itu tertuju dan terjadi di Amerika Serikat, yang notabene merupakan negara *superpower*, agaknya peristiwa ini dianggap sebagai *defining moment* sulit untuk dibantah, terlebih lagi dengan adanya peristiwa tersebut, berhasil mengubah *landscape* tatanan global dan mengubah orientasi politik internasional, yang ujungnya akan menggeser juga orientasi politik global karena posisinya, baik dari segi

ekonomi, politik, maupun militer.<sup>3</sup> Misalnya dalam tindakan Amerika Serikat yang melakukan invasi ke Irak, pada akhirnya hal tersebut mempengaruhi banyak persoalan akan hubungan antar negara di dunia.<sup>4</sup> Serangan tersebut entah bertujuan sebagai salah satu bentuk pemerangan terorisme, karena diduga Rezim Saddam Hussein ‘menyembunyikan’ Osama Bin Laden sebagai salah satu otak dan pemimpin dalam peristiwa serangan 9/11, ataukah karena dugaan bahwa Irak memiliki dan mengembangkan *Weapon of Mass Destruction* (WMD). Namun yang terpenting ialah, bahwa menurut kritikus kebijakan Amerika Serikat terkemuka, Noam Chomsky, mengatakan bahwa invasi Amerika Serikat ke Irak justru memperluas jaringan terorisme dalam skala global, dan menjadikan Irak sebagai basis untuk latihan para teroris.<sup>5</sup> Ancaman tentu saja tidak hanya dari perang besar berskala global, seperti perang dunia I dan II, namun di era global sekarang ini, ancaman terhadap kehidupan manusia bisa datang di mana saja, kapan, saja dan dari siapa saja. Bisa saja ancaman tersebut berasal dari kekuatan radikal yang berkembang di masyarakat.<sup>6</sup> Ancaman tidak hanya berasal dari tentara, persenjataan dan militer yang canggih – mereka tidak lagi memegang monopoli kekerasan terhadap kemanusiaan. Justru ancaman tersebut berasal dari kekuatan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Terorisme dapat terjadi dimana saja, kapan

<sup>1</sup> Rizal Sukma. 2003. “Keamanan Internasional Pasca 11 September 2001: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional” Makalah ini disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema ‘*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*’ yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Denpasar, 14-18 Juli 2003. Tersedia dalam: <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/keamanan%20Intl%20-%20rizal%20sukma.pdf>

<sup>2</sup> Budi Winarno. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Gejayan, Jogjakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*)

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Invasi Amerika Serikat ke Irak diduga menelan biaya yang paling mahal sejak Perang Dunia II. Estimasi sebelum invasi dilakukan, pemerintah Amerika Serikat memproyeksikan biaya perang akan menelan biaya sejumlah US\$ 50 miliar. Namun, dalam praktiknya, biaya perang membengkak mencapai US\$ 3 triliun, dan agaknya masih belum bisa mengakhiri perang itu secara total. Lihat Joseph E. Stiglitz dan Linda J. Bilmes. 2008. *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*. New York: WW Norton & Company, Inc.

<sup>5</sup> Noam Chomsky. 2006. *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. New York: Metropolitan Books.

<sup>6</sup> Budi Winarno. 2014. *loc.cit.*

saja, dan menjadi ancaman serius bagi keamanan global.<sup>7</sup> Hal tersebut juga secara langsung mengancam keamanan setiap individu. Walaupun terorisme bukan lagi menjadi salah satu ancaman utama, namun tidak bisa diabaikan begitu saja karena kita tidak akan pernah tahu kapan serangan itu akan datang. Seperti halnya Amerika, sebagai negara adidaya yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan liberalisme kapitalis, menganggap bahwa serangan terorisme merupakan hal yang sangat berbahaya. Titik mula meluasnya tindakan terorisme diawali oleh *Al-Qaeda*, sebuah organisasi teroris yang sangat besar – setidaknya sebelum munculnya ISIS, yang merupakan perpecahan dari *Al-Qaeda* itu sendiri. Pemimpin *Al-Qaeda* terdahulu, Osama Bin Laden, menjadi dalang dalam peristiwa paling bersejarah di dunia, yaitu peristiwa 11 September 2001 di New York, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 9/11. Peristiwa kelam itu menyebabkan runtuhnya jantung pertahanan dan gedung penting di Amerika. *Al-Qaeda* berdiri sejak tahun 1988 oleh Osama bin Laden. Keberadaan organisasi ini masih belum menunjukkan sepak terjang nyata, dan belum begitu dikenal masyarakat. Baru pada akhirnya, peristiwa pertama oleh *Al-Qaeda* yang sangat menyita publik adalah, pembajakan empat pesawat komersil Amerika Serikat. Sebanyak dua pesawat menabrak gedung *World Trade Center*, satu pesawat menabrak gedung Pentagon di Washington, dan satu pesawat di Pennsylvania.<sup>8</sup> Kejadian yang paling terkesan adalah saat pesawat tersebut menabrak gedung *World Trade Center* dan Pentagon, karena dua gedung tersebut merupakan gedung penting, sebagai jantung pertahanan dan ekonomi negara adidaya tersebut. Peristiwa naas itu benar-benar membawa pukulan bagi Amerika, dan

melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan terorisme. Berawal dari *defining moment* tersebut, kelompok-kelompok serupa dengan tindakan yang tergolong serupa mulai banyak mencuat ke permukaan. Beberapa organisasi yang berafiliasi dengan *Al-Qaeda* – atau organisasi yang merupakan perpecahan dari *Al-Qaeda* sendiri. Seperti halnya *Al-Qaeda*, sebenarnya ISIS sudah mulai muncul sekitar tahun 1999 – dengan nama yang berbeda. Kemudian ISIS terus berganti nama sampai pada akhirnya tahun 2014 merupakan titik mula tindakan ISIS yang tersorot oleh media. Masalah ISIS di Indonesia akhir-akhir ini sudah semakin menjadi perhatian utama semua pihak – mengingat berbagai propaganda yang dilakukan berhasil menarik simpati sebagian dari masyarakat. Terbukti sudah banyak WNI yang berangkat menuju Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS serta ada yang secara terang-terangan menyatakan menjadi simpatisan ISIS dengan berbagai cara termasuk mengibarkan bendera berlambang ISIS di depan rumahnya. Beberapa dari mereka merupakan TKI yang menjadikan status tersebut sebagai dalih, atau bahkan para TKI tersebut tertarik bergabung setelah beberapa saat berada di negara tempat mereka dikirim. Tentu saja fenomena semacam ini harus disikapi dengan bijak dan tegas agar tidak menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

## 1.2 Objek Kajian

Dalam studi Hubungan Internasional, objek yang dikaji merupakan negara sebagai aktor utama. Namun tidak hanya negara, Hubungan Internasional dewasa ini mengkaji berbagai aktor lain selain negara, yakni perusahaan multinasional, organisasi internasional, bahkan individu. Berbagai perdebatan mengasumsikan agar suatu disiplin itu ada, membutuhkan objek yang jelas atau berbeda, dan juga persetujuan pada definisi. Pandangan yang paling luas yang paling mungkin adalah poin yang pertama, dengan

<sup>7</sup> Ann E. Robertson. 2007. *Terrorism and Global Security*. New York: Fact on File, INC

<sup>8</sup> *History. 9/11 Attack*. Tersedia:

<http://www.history.com/topics/9-11-attacks>

kata lain disiplin itu ada karena meluas dari adanya objek ilmu tersebut.<sup>9</sup> Hubungan Internasional sendiri awalnya ada untuk mengkaji fenomena yang terjadi di antara hubungan antar aktor, khususnya hubungan antar negara – untuk mencari sebab terjadinya perang dan solusinya. Setelah berakhirnya perang, banyak sekali terjadi perubahan yang menyebabkan adanya pergeseran dalam objek kajian itu sendiri. Memang sebenarnya tidak – atau belum ada objek kajian yang sudah pakem dalam hubungan internasional, karena bagaimanapun juga, hubungan internasional lahir dengan bantuan teori dari disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, hukum, ekonomi, dan masih banyak lagi. Memungkinkan terjadinya berbagai perubahan dari objek kajian di ke depannya, namun disini dengan sedikit pemaparan di atas, penulis berusaha menyimpulkan dengan menggunakan negara sebagai objek kajian utama, dimana Indonesia yang menjadi kajiannya, dan juga langkah yang diambil Indonesia dalam menghadapi ancaman global terorisme, khususnya ISIS.

## 2. Tinjauan Teoritis

### 2.1 Diplomasi

Pada masa ini memang diplomasi mengalami perluasan makna dan fungsi, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meluasnya isu internasional – dari yang hanya dilakukan pihak tertentu dan hanya dilakukan antar-negara, sekarang diplomasi juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional<sup>10</sup> dan aktor non-negara lainnya. Secara singkatnya, diplomasi merupakan Pratik pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi.<sup>11</sup> Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijakan luar negeri

serta pelaksanaannya.<sup>12</sup> Pada dasarnya Diplomasi tidak bisa dipisahkan dengan politik luar negeri, dan keduanya merupakan kebijakan eksekutif untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik.<sup>13</sup> Dengan demikian diplomasi itu juga merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan (kepentingan nasionalnya) dan memperoleh dukungan mengenai prinsip yang diambil.<sup>14</sup> Secara luas, tujuan diplomasi dibagi menjadi empat<sup>15</sup>:

- 1) Tujuan Ekonomi  
Merupakan pilihan utama dalam berdiplomasi. Dengan adanya sistem perdagangan bebas dan liberalism ekonomi yang menimbulkan dampak terhadap ekonomi nasional, membuat negara sadar bahwa perdagangan dan keuangan dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional.
- 2) Tujuan Budaya  
Salah satu tujuan diplomasi dalam ranah budaya adalah dengan memberikan keagungan budaya suatu negara yang diharapkan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat.
- 3) Tujuan Ideologi  
Ideologi merupakan hal yang penting karena kekuatan dan kemampuannya untuk menggerakkan pikiran masyarakat.
- 4) Tujuan Politik  
Inti dari tujuan politik adalah pengamanan kebebasan politik dan integritasnya, mencapai tujuan nasional secara damai dan mencegah negara lain bergabung untuk melawan suatu negara tertentu.

### 2.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri menurut Mark R. Amstutz yaitu: “*Explicit and implicit actions of governmental officials design to promote*

<sup>9</sup> Ole Weaver. 2007. *Still a Discipline After All These Debates?* dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (eds.) *International Relations Theories, Discipline, and Diversity*. Oxford University Press.

<sup>10</sup> Aelina Surya. 2010. *Praktik Diplomasi Terpilih Pada Masa Perang Dingin*. Bandung: PT Kibar Internasional.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Jack Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Pustaka Abidin

<sup>13</sup> Sumaryo Suryokusumo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH “IBLAM

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Aelina Surya. 2010. *op.cit.*

*national interest beyond a country's territorial boundaries.*"<sup>16</sup> Sedangkan menurut Holsti: "Lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut".<sup>17</sup> Secara singkatnya, kebijakan luar negeri merupakan suatu instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor lain dalam politik dunia demi mencapai kepentingan nasionalnya. Masing-masing negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, dan tentunya kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda, tergantung dari tujuan yang hendak dicapai suatu negara tertentu – walaupun mungkin kepentingan nasional suatu negara serupa, tentu saja masing-masing negara memiliki caranya masing-masing untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Suatu negara belum tentu dapat mencapai kepentingan nasionalnya secara domestik, di dalam negara itu sendiri. Oleh karena itu suatu negara harus memperluas jaringannya, dan juga memperluas pergaulannya supaya dapat mencapai tujuan dengan lebih mudah dan efisien – dengan melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan luar negeri untuk menjalin hubungan dengan aktor lain di luar suatu batas teritorial wilayah negara tersebut. Kebijakan Luar Negeri menekankan kepada **aksi** atau tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternal dalam memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasional.

Suatu negara dalam menjalankan kerjasama internasional, selalu berhubungan dengan negara lain. Maka dari itu kebijakan

yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berkenaan dengan perihal di dalam negeri, namun juga butuh kebijakan luar negeri, karena bagaimanapun, dibutuhkan suatu pedoman untuk mengetahui pola perilaku dan interaksi negara.<sup>18</sup> Seringkali ancaman bukan datang dari sisi internal, namun justru dari sisi eksternal dari negara lain. Hal ini menimbulkan *International Affairs* yang memicu negara-negara untuk mengemukakan berbagai kebijakan luar negeri sebagai langkah bertahan.<sup>19</sup> Kebijakan luar negeri tidak hanya mengenai masalah perang walau pada awalnya dibentuk setelah perang dunia kedua, namun seiring berjalannya waktu dan dalam perkembangannya tidak hanya lagi mengkaji masalah perang, namun juga soal ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya.

Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang kuat, suatu negara harus memiliki kebijakan dalam negeri yang kuat juga – sebagaimana suatu negara harus memiliki dasar, memiliki fondasi yang kuat untuk dapat memperluas jaringannya keluar batas wilayah negara tersebut. Jika suatu negara memiliki kebijakan dalam negeri yang lemah, bagaimana ia dapat mengatur hubungannya dengan negara lain, jika internal negara tersebut tidak dapat diatur dengan kebijakan dalam negeri yang baik dan kuat.

Kecenderungan suatu negara untuk merumuskan kebijakan luar negerinya, salah satunya tergantung dari pemerintahan negara tersebut. Jika negara tersebut demokratis, maka yang difokuskan adalah keseimbangan antara *human security* dan juga *national security*. Pemerintahan demokratis tidak hanya melihat pentingnya menjaga keamanan nasional, namun juga pentingnya menjaga keamanan setiap individu. Sedangkan pemerintahan yang otoriter, yang biasanya

<sup>16</sup> Mark R. Amstutz. 1995. *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque: Brown and Benchmark. Hal. 146.

<sup>17</sup> K.J. Holsti. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

<sup>18</sup> Marijke Breuning. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.

<sup>19</sup> I.G. Wahyu Wicaksana. 2007. *Epistemologi Politik Luar Negeri: "A Guide to Theory"*. Global & Strategis.

didominasi oleh kekuatan militer, akan cenderung memfokuskan untuk merumuskan kebijakan untuk *national security* saja. Pencapaian suatu kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh adanya kesempatan atau peluang (*opportunities*) dan juga kendala (*constraints*) yang ada di lingkungan internal maupun eksternal. Para pembuat kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan peluang sebesar mungkin yang ada di tengah persaingan yang semakin ketat, dan juga memikirkan tindakan secara cepat dalam mengatasi kendala yang ada. Kebijakan luar negeri yang dirumuskan sangat berkaitan erat dengan kepentingan nasional suatu negara, maka dari itu, karena cakupannya luas, Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi membagi tujuan kebijakan luar negeri berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka pendek – jangka pendek, tingkat kepentingannya bervariasi, namun sering urgensinya tinggi, jangka menengah – tidak terlalu mendesak, namun tetap penting, dan jangka panjang – tidak mendesak namun tingkat kepentingannya lebih tinggi, karena menyangkut nasib beberapa waktu ke depan dalam jangka yang lama.<sup>20</sup>

## 2.2 Keamanan dan Teorisme

Untuk dapat mencapai kepentingan nasional, suatu negara perlu merumuskan kebijakan untuk dapat menjaga keamanannya. Cakupan luas konsep keamanan itu sendiri dapat dibagi menjadi keamanan nasional, keamanan internasional, dan bahkan sekarang konsep yang lebih luas lagi, yakni keamanan global. Konsep keamanan ini sendiri masih dapat dikatakan sebagai konsep yang abstrak, karena tidak ada penjelasan yang pasti, mengacu kepada apa dan apa kajiannya.<sup>21</sup>

Keamanan<sup>22</sup>, atau *security*, menurut Paul D. William, dapat dipahami sebagai akumulasi dari kekuatan (*accumulation of power*). Semakin besar kekuatan dari suatu pihak, maka keamanannya semakin terjamin.<sup>23</sup> Terkait dengan konsep keamanan, banyak juga konsep-konsep lain yang terkait dengan keamanan itu sendiri, di antaranya perang, keamanan kolektif, perdamaian, mediasi, resolusi konflik, dilema keamanan, dan masih banyak lagi konsep terkait lainnya.<sup>24</sup>

Untuk menjelaskan konsep isu keamanan tersebut, maka akan dibagi menjadi dua jenis keamanan, yang pertama adalah keamanan tradisional, yang kedua adalah keamanan non-tradisional. Jika berbicara mengenai keamanan tradisional, maka yang menjadi acuan adalah negara sebagai *referent object* dan terdiri dari tiga elemen pokok: *the idea of the state*, *the institutional expression of the state*, dan *physical base of the state*<sup>25</sup> – sedangkan jika berbicara mengenai keamanan non-tradisional, maka yang dijadikan *referent object* adalah individu. Secara singkat, membicarakan masalah keamanan tradisional, maka berdasarkan kategorisasi Barry Buzan, maka *state security* menjadi fokus keamanan tradisional, dan keamanan non-tradisional akan membicarakan *human security*.<sup>26</sup> Isu yang dibahas dalam konsep keamanan tradisional, yaitu mengenai militer dan

<sup>20</sup> Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. 1997. *International Relations and World Politics: Security Economy and Identity*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

<sup>21</sup> Aleksius Jemadu. 2014. *Politik Global dalam Teori dan Isu Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 105.

<sup>22</sup> Keamanan dapat dilihat sebagai ‘komoditas’ (supaya suatu pihak aman, maka harus ada senjata, uang, tentara, dan hal lainnya). Dari pandangan lain, *security* dapat dipahami dalam kaitan dengan relasi antar-aktor yang berbeda, bisa secara negatif (tidak ada ancaman, dengan militer atau lainnya), atau bisa juga positif (tidak ada ancaman dan mampu untuk melakukan suatu hal ke depannya). Dalam konteks ini keamanan dilihat dalam konteks kebebasan (*freedom from and freedom for*). Untuk referensi lebih lanjut, dapat dilihat dalam: Paul D. William. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge

<sup>23</sup> William. 2008. *op.cit.* hal. 6.

<sup>24</sup> Aleksius Jemadu. 2014. *loc.cit.*

<sup>25</sup> Barry Buzan. 1991. *People, States and Fear*. New York: Harvester Wheatsheaf.

<sup>26</sup> David A. Baldwin. 1997. *The Concept of Security*. British International Studies Association.

ideologi. Lalu isu apa yang dibahas dalam keamanan non-tradisional? Isu yang dibahas dalam keamanan non-tradisional, merujuk kepada permasalahan non-militer dan ideologi. Seperti halnya kesehatan, Hak Asasi Manusia, penyelundupan, demokrasi, lingkungan, terorisme, dan lainnya.

Isu tradisional tentu saja masih menjadi kajian dalam hubungan internasional, karena bagaimanapun, penggunaan kekuatan militer tidak akan terlepas dari titik awal munculnya studi Hubungan Internasional, yakni *war and peace*. Namun sejak berakhirnya perang dingin, terdapat kesempatan untuk membahas isu-isu lain, yang pada awalnya dianggap sebagai *low politics*, yaitu isu non-tradisional itu sendiri.<sup>27</sup> Dewasa ini, isu non-tradisional tidak kalah pentingnya dengan isu tradisional. Walaupun untuk saat ini, permasalahan ideologi dan penggunaan kekuatan militer masih ada. Penggunaan kekuatan militer yang berfungsi di luar kegunaannya selain untuk berperang, dan perang sendiri masih dapat terjadi, walau perang dengan skala global untuk saat ini kemungkinannya kecil. Masalah Kesehatan misalnya, beberapa waktu terakhir cukup menyita perhatian dunia dengan adanya virus ebola, dan beberapa penyakit dengan virus yang diduga sebagai salah satu bentuk dari *bioterrorism*. Namun tidak lain dan tidak bukan, permasalahan yang selalu menyita beberapa dekade terakhir ini adalah permasalahan terorisme. Bagaimana suatu negara adidaya pun membutuhkan kerjasama dari negara-negara lain untuk memberantas tindakan terorisme tersebut.

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan terorisme itu? Sampai saat ini, belum ada definisi tetap dan belum mencapai konsensus akan apa yang dimaksud dengan terorisme, lalu tindakan seperti apa yang tergolong ke dalam terorisme, serta siapa saja

yang dapat dianggap sebagai seorang teroris? Beberapa pihak dan hampir semua pihak mendefinisikan terorisme dari sudut pandang subyektif, sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Hoffman, "*the decision to call somebody or label some organization 'terrorist' become almost unavoidably subjective, depending largely on one sympathizes with or opposes the person or group or cause concerned.*"<sup>28</sup> Menurut Bruce Hoffman, biasanya tindakan teroris dirancang untuk mengkomunikasikan sebuah pesan, biasanya, hal ini dipahami dan dilakukan dalam cara yang secara simultan merefleksikan tujuan-tujuan khusus dan motivasi suatu kelompok tertentu, yang disesuaikan dengan sumber-sumber dan kapabilitas, dan mengambil sejumlah target di mana tindakan tersebut ditunjukkan.<sup>29</sup> Pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai: "*Premeditated politically motivated violence against non-combatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience.*" (US Department of State, 2001:13)<sup>30</sup> Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi terorisme sebagai berikut<sup>31</sup>:

*Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby – in contrast to assassination – the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets)*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Williams. 2008. *op.cit.* hal. 172.

<sup>31</sup> Yanyan Mochamad Yani. 2010. "Kemenangan Partai Demokrat dan Masa Depan Perang Global Melawan Terorisme," tersedia dalam: [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/kemenangan\\_partai\\_demokrat\\_dan\\_masa\\_depan.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/kemenangan_partai_demokrat_dan_masa_depan.pdf)

<sup>27</sup> Richard Crockatt. 1999. "*The End of the Cold War*" dalam John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press.

from a target population, and serve as message generators. Threat – and violence – based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demand, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought.

Mengambil garis besar dari dua definisi yang sudah dijabarkan sebelumnya, terorisme dianggap sebagai suatu kegiatan dengan menggunakan kekerasan, dan didukung oleh adanya motif politik dengan mengarahkan serangan kepada target tertentu, dan targetnya kebanyakan adalah non-kombatan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa tindakan terorisme ini tidak hanya sekedar menciptakan teror dalam masyarakat, namun juga targetnya adalah media. Publikasi media massa menjadi salah satu tujuan adanya aksi terorisme tersebut. Semakin luas berita tersebut beredar, maka akan semakin penebar aksi teror tersebut merasa senang dan sukses karena tujuannya tercapai – terlebih jika media menyampaikan rentetan peristiwa secara aktif dan kritis serta detil.<sup>32</sup> Tindakan kejahatan terorisme ini tidak tunduk kepada aturan apapun, karena nilai kebenarannya terletak pada dirinya sendiri.<sup>33</sup> Tindakan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh teroris adalah dengan bom bunuh diri, penculikan, pembajakan, dan lainnya.

Terlepas dari itu semua, sebenarnya masih tidak pasti apakah kategorisasi tindakan terorisme seperti itu, karena pada dasarnya definisi terorisme itu sendiri belum pakem dan mencapai konsensus. Hanya saja karena mayoritas dari aksi tersebut mengacu kepada tindakan tertentu, maka PBB dan beberapa pakar membuat suatu definisi dan kategorisasi yang menjadi titik acu. Apakah memang tujuan dari terorisme adalah hanya sekedar

menjadi *shadow enemy*, ataukah, memang terkandung muatan-muatan politik dan berdasarkan pada ideologi dan juga ajaran agama yang dewasa ini meluas dan menjadi aksi mayoritas. Ada tiga ciri utama terorisme menurut analisa Robertson:<sup>34</sup>

- 1) Terorisme menggunakan kekerasan untuk menarik perhatian akan suatu maksud atau alasan di balik tindakan mereka. Seperti yang diketahui oleh kebanyakan orang, mereka melakukan tindakan, berusaha untuk membuat rasa takut kepada masyarakat, atau bahkan pemerintah dengan melukai beberapa orang. Rata-rata teroris lebih sering menggunakan senjata tradisional, seperti menanam bom, senjata tajam, atau bahkan menabrakkan mobil truk dengan muatan penuh bom.
- 2) Teroris menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai target, meskipun tidak seluruh aksi terorisme hanya menargetkan non-kombatan. Dalam beberapa peristiwa tertentu, mereka turut menargetkan tokoh politik penting. Namun tetap saja, target utama mereka adalah para non-kombatan.
- 3) Tindakan yang dilakukan para teroris berusaha menarik perhatian atas maksud-maksud dari tindakan mereka. Mereka ingin menciptakan suatu *image* yang tidak akan terlupakan akan kehadiran mereka dan apa yang sudah dan akan lakukan di kemudian hari. Seperti halnya dikemukakan ahli media dan terorisme, Brigitte Nacos, “*Terrorist do not want to win the hearts of ... the people their target and even not those who look on in the international realm.*”<sup>35</sup>

### Tipologi Terorisme

Wilkinson memaparkan klasifikasi dan analisis mengenai tipologi terorisme menjadi kerangka analisis paling jelas. Ia mengkategorisasikan terorisme menjadi empat

<sup>32</sup> Piliang. 2004. Dalam Hendropriyono. 2009. “Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam.” Jakarta: Kompas. Hal. 25

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Robertson. 2007. *op.cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*



tipe<sup>36</sup>: (1) Terorisme Kriminal, merupakan tindakan teror yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial, maupun material, (2) Terorisme Psikis, merupakan bentuk terorisme yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan secara spiritual, (3) Terorisme Perang, merupakan pemusnahan atau pembasmian musuh melalui berbagai cara, (4) Terorisme Politis, yakni suatu upaya sistematis menggunakan kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan politis. Untuk terorisme politis, Wilkinson membagi menjadi tiga kategori lagi, yaitu revolusioner, sub-revolusioner, dan represif.<sup>37</sup> *Kategori pertama*, terorisme revolusioner merepresentasikan suatu taktik dalam terorisme yang sistematis dengan tujuan untuk membawa perubahan radikal dalam tatanan politik, baik dalam skala nasional, internasional, maupun global. *Kategori kedua*, sub-revolusioner, menggunakan kekerasan teroristik untuk mengubah suatu kebijakan publik, tanpa harus mengubah tatanan politiknya. *Kategori ketiga*, terorisme represif, merupakan penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan, mengekang individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh *oppressor*.

### 3. Pembahasan dan Analisis

#### 3.1 Respon Indonesia

Kepentingan nasional Indonesia salah satunya adalah, untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara – karena kestabilan kawasan ini menjadi salah satu faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi keamanan dan kestabilan nasional Indonesia itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon di

KTT ASEAN Summit di Myanmar.<sup>38</sup> Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal tersebut, Ban Ki-Moon mengajak turut serta Presiden Jokowi untuk Indonesia ikut berperang melawan teroris ISIS.<sup>39</sup> Namun Presiden Joko Widodo menolak hal tersebut dengan alasan, pendekatan metodologi dinilai lebih baik dan ampuh – karena menurutnya kekerasan yang dibalas dengan kekerasan seperti serangan yang dilakukan negara lain, tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah baru – yang mungkin menggunakan kekerasan juga.<sup>40</sup> Misalkan dengan pendekatan agama dan juga ideologi untuk memahami aliran radikal tersebut.

Melihat dari kurun waktu ISIS mulai beraksi, sekitar tahun 2014 sampai sekarang, sekiranya belum banyak hal yang benar-benar nyata dan berdampak yang dilakukan Indonesia khusus untuk menangani masalah ini. Namun Indonesia mengambil sikap tegas untuk menolak aliran ini masuk ke tanah air, dan tentunya dapat menjadi penghancur kesatuan negara. Indonesia yakin bahwa masalah ISIS dapat diatasi, walaupun tetap tidak bisa melepaskan kewaspadaan dan kesiagaan. Pada tahun 2014, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menganggap, bahwa masalah ISIS ini merupakan masalah ideologi. Untuk mengatasi hal ini tidak bisa dengan pendekatan *hard power*, melainkan perlahan dengan *soft power* atau justru *smart power* dengan pendekatan sosial dan budaya. Mengapa? Marty Natalegawa berpendapat bahwa tindakan yang diambil tidak bisa hanya kekuatan kekerasan semata, karena kemungkinan besar tidak akan langgeng. Maka

<sup>36</sup> James M. Poland. 2005. *Understanding Terrorism: Groups, Strategies, and Response Second Edition*. Pearson Education, Inc.: Prentice Hall. akses *on-line* tersedia dalam: [http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2520/2580827/CJ330\\_Ch01.pdf](http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2520/2580827/CJ330_Ch01.pdf)

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Bang Joel. 2015. “Indonesia Tolak Perang dengan Negara ISIS Secara Kekerasan,” tersedia dalam: <https://www.idjoel.com/indonesia-tolak-perang-dengan-negara-isis-dengan-kekerasan/>

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

harus dengan tindakan komprehensif.<sup>41</sup> Memang tindakan kejam ISIS yang menggunakan senjata juga membuat beberapa orang berpikir untuk melawannya dengan senjata juga. Namun Indonesia mengambil sikap dengan melalui diplomasi *soft power* – hal ini dinilai lebih efektif dalam menghadapi radikalisme dan paham ISIS, karena penyebaran ISIS di Indonesia terutama, disebabkan adanya pemahaman yang salah mengenai konsep jihad. Bisa dengan melakukan pemberdayaan masjid dan pesantren dengan kerjasama dengan beberapa tokoh keagamaan dan juga tokoh masyarakat sosial.

Beberapa hal yang dilakukan seperti mengajarkan baca Al-Quran kepada anak-anak sejak dini supaya mereka tidak mudah terpengaruh, dan memperkuat Mengambil dari contoh kasus beberapa saat lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan tanggapan akan beberapa TKI di Korea Selatan yang diduga terlibat dengan jaringan ISIS dengan menjalin komunikasi – yang diketahui saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Negeri Ginseng tersebut.<sup>42</sup> Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa ini bukan menjadi masalah dan dapat diatasi ketika TKI itu kembali ke Indonesia.<sup>43</sup> Dilanjutkan dengan tindakan yang diambil Presiden Joko Widodo, dengan meminta Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, untuk memperketat pembinaan terhadap TKI yang akan diberangkatkan. Delapan TKI tersebut diketahui melakukan komunikasi dengan situs media sosial yang terkoneksi dengan ISIS. Dengan iming-iming kehidupan yang menyenangkan dan juga dalih pengajian, ISIS berusaha menarik beberapa

TKI yang ada, kemudian berusaha menyusupkan beberapa doktrin ISIS.<sup>44</sup> Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan sanksi sesuai dengan UUD, bahwa Warga Negara Indonesia yang diketahui terlibat dengan jaringan terorisme, baik ISIS atau jaringan apapun – apalagi sampai terlibat perang, maka akan dikenakan sanksi pencabutan kewarganegaraan.<sup>45</sup> Tidak hanya itu, hal ini menjadi dasar untuk imigrasi melakukan pencabutan paspor sebagai tanda identitas diri.<sup>46</sup>

Dalam konteks nasional, Indonesia lebih berperan dalam upaya pencegahan supaya nilai-nilai ISIS tidak masuk. Dengan melakukan pendekatan *soft power* dimulai dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi – keduanya berpendapat untuk melakukan tindakan preventif melalui diplomasi *soft power*. Peranan Polri, TNI, badan intelejen dan tokoh adat, tokoh agama, bahkan masyarakat sendiri mengambil peranan penting. Semua pihak terlibat dalam pencegahan dan bahkan pemberantasan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk mencegah masuknya ISIS ke Indonesia. Salah langkah yang akan dilakukan adalah upaya preventif atau pembinaan.<sup>47</sup> Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) juga melakukan penanggulangan dengan melakukan sosialisasi dan dialog, penanaman tahun damai di dunia maya – karena memang jalur yang ditempuh ISIS dalam menarik simpati masyarakat adalah dengan

<sup>41</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2014. Pada 25 September 2014. Tersedia dalam: <http://setkab.go.id/menlu-penyelesaian-kasus-isis-harus-komprehensif/>

<sup>42</sup> Ahmad Romadoni, 2016. “Komentar JK Soal 8 TKI di Korsel Terlibat ISIS,” dalam Liputan6, 24 Mei 2016. Tersedia dalam: <http://news.liputan6.com/read/2514825/komentar-jk-soal-8-tki-di-korsel-terlibat-isis>

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Silvanus Alvin. 2015. “JK: Ikut ISIS, Kewarganegaraan Hilang,” dalam Liputan6 18 Maret 2015. Tersedia dalam: <http://news.liputan6.com/read/2193061/jk-ikut-isis-kewarganegaraan-hilang>

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Intelejen Indonesia. “Ini Dia Upaya Polri Cegah Bibit ISIS di Indonesia,” tersedia dalam: <https://www.intelijen.co.id/ini-dia-upaya-polri-cegah-bibit-isis-di-indonesia/>

menggunakan media sosial dan media komunikasi seperti *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, dan yang lainnya, dengan menggandeng berbagai lembaga terkait berupa kontra ideologi, kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra radikal.<sup>48</sup> Prosedur Standar Operasional (SOP) pengawasan daerah perbatasan, perlindungan objek vital dan lingkungan strategis, serta melakukan program deradikalisasi baik di dalam Lembaga Masyarakat (Lapas) maupun di luar Lapas juga disiapkan.<sup>49</sup> BNPT juga menyelesaikan SOP pengawasan daerah perbatasan.<sup>50</sup> Indonesia juga saat ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara terkait dengan perang terhadap ISIS, seperti dengan Turki, Rusia, Australia dalam masalah kontraterorisme.

Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Diplomasi Indonesia sendiri menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menonjolkan karakter sebagai negara mariti<sup>51</sup>. Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat (*diplomacy for the people*) yang akan dilakukan secara tegas dan bermartabat serta membumi.<sup>52</sup> Sebagai implementasi visi dan misi Presiden – Wakil Presiden, maka prioritas politik luar negeri Indonesia akan difokuskan pada:<sup>53</sup> (1) menjadi kedaulatan Indonesia, (2) perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, (3) diplomasi

ekonomi untuk menopang kemandirian ekonomi nasional, (4) meningkatkan peran aktif Indonesia di kawasan dan dunia internasional. Merupakan tugas bagi diplomat untuk ke luar negeri dan membentengi Indonesia dari kemungkinan munculnya ancaman eksternal yang mengganggu kedaulatan Indonesia melalui gerakan separatis. ASEAN akan selalu menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Namun hal tersebut juga sepertinya tidak bisa dijadikan prioritas satu-satunya. Menurut Mohammad Rosyidin, peneliti politik internasional dari Universitas Diponegoro, pemerintah perlu mengkaji langkah kebijakan luar negeri untuk mencegah ancaman keberadaan ISIS.<sup>54</sup> Pemerintah perlu melihat dari segi persoalan strategis kebijakan luar negeri, bukan hanya dari segi domestik saja. Beliau menegaskan pemerintah harus meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah. Sumber daya diplomatik juga harus digunakan semaksimal mungkin. Hubungan diplomatik di negara Timur Tengah sebagai basis ISIS dinilai kurang efisien karena Indonesia terlalu memfokuskan pada Asia Tenggara. Hubungan bilateral dengan negara Timur Tengah harus lebih intensif agar menjadi batu loncatan bagi pemerintah Indonesia.

### 3.2 Respon Dunia Internasional

Berbicara mengenai terorisme, tentu saja akan familiar dan tidak terlepas oleh Amerika, karena memegang perang penting dalam upaya untuk memerangi terorisme. Selain karena Amerika menjadi sasaran, sebagai negara adidaya, negara *superpower*, tentu saja kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Amerika mempengaruhi tatanan global juga.<sup>55</sup>

<sup>48</sup> Saiful Munir. 2015. "Beberapa Upaya BNPT Bentengi Indonesia dari Ancaman ISIS," dalam *Sindonews* 4 Desember 2015. Tersedia dalam: <http://nasional.sindonews.com/read/1066861/14/beberap-a-upaya-bnpt-bentengi-indonesia-dari-ancaman-isis-1449228539>

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Retno L.P. Marsudi. 2015. "Diplomasi Indonesia akan Terkoneksi dengan Kepentingan Rakyat," dalam *Tabloid Diplomasi* Februari 2015. Tersedia dalam: <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/210-4-articles-februari-2015/1827-diplomasi-indonesia-akan-terkoneksi-dengan-kepentingan-rakyat.html>

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Andrey Gromico. 2016. "Islam Moderat Dinilai Bisa Menangkal propaganda ISIS," dalam *Geotimes* 28 Januari 2016, tersedia dalam: <http://geotimes.co.id/islam-moderat-dinilai-bisa-menangkal-propaganda-isis/>

<sup>55</sup> Sukma. 2003. *op.cit.*

Seringkali Amerika juga bertindak unilateral dalam menghadapi sesuatu pasca perang dingin.<sup>56</sup> Mengutip kata-kata George Bush, “*either you are with us or you are with the terrorist*”, memberikan pandangan bahwa dunia ada terdapat struktur bipolar, akan kekuatan baik (sekutu Amerika) dan kekuatan jahat (teroris). Sejak peristiwa 9/11, Amerika sepertinya lebih peduli akan masalah terorisme dibandingkan dengan isu HAM dan demokrasi, dan menjadikan Amerika memiliki suatu ukuran atau parameter untuk menilai suatu negara. Rata-rata kebijakan yang diambil oleh Amerika memicu ketegangan antara Amerika dengan negara-negara Islam. Sebabnya Amerika yang ‘takut’ akan aksi teror tersebut berusaha menarik dan membentuk aliansi melalui *new containment policy* atau politik pembendungan baru. Dengan doktrin bahwa mengentaskan terorisme dengan melakukan invasi atau dengan mengerahkan kekuatan militer, justru akan memperluas jaringan terorisme, disebabkan kelompok-kelompok yang merasa terintimidasi akan berusaha mencari cara untuk memerangi tindakan Amerika, dengan melakukan latihan, mencari dan menarik orang untuk bergabung dan berafiliasi dengan kelompok dengan membentuk jaringan di negara lain yang memiliki ideologi yang sama, untuk melawan Amerika. Tindakan anti-Amerika ini tentu menyulut sebagian pihak yang juga merasa ada ketidakadilan dan terintimidasi.

Lain halnya di Eropa, sejak terjadinya serangan terorisme pada tahun 2003 yang mengguncang Amerika dan Eropa, Uni Eropa membuat *draft European Security Strategies*, dimana mereka memasukkan terorisme dan *Weapon of Mass Destruction* sebagai dua dari ancaman besar keamanan terhadap UE.<sup>57</sup> Pada tahun 2005, UE mengadopsi *European Union Counter-Terrorism Strategy* dengan komitmen utama untuk menanggulangi terorisme dengan tetap menghormati HAM dan menjadikan

Eropa tempat yang aman, memungkinkan warga negara untuk tinggal di wilayah yang mana, bebas, dan adil.<sup>58</sup> Tujuan ini dicapai melalui empat pilar utama dalam strategi melawan terorisme, yaitu: (1) *Prevention*, mencegah orang-orang supaya tidak masuk ke dalam jaringan teror baik dalam lingkup UE itu sendiri, maupun internasional, (2) *Protection*, melindungi seluruh warga negara serta infrastruktur UE, dan meminimalisir kerentanan mereka terhadap serangan yang ada, (3) *Pursue*, memperkuat upaya kolektif UE untuk menjalankan keamanan kolektif demi menghadapi ancaman serangan, seperti memperkuat badan yang sudah ada, (4) *Response*, menuntun UE untuk bekerjasama lebih erat dengan organisasi internasional, dan juga bekerjasama dengan negara lain. Seperti misalnya PBB dan juga NATO. Sayangnya beberapa pihak menganggap bahwa apa yang dilakukan UE semata-mata hanya demi kepentingan wilayahnya saja. Tantangan yang dihadapi UE saat ini adalah bagaimana menyatukan sikap dan pandangan seluruh warga negara terhadap kebijakan yang hendak diterapkan.<sup>59</sup>

Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar terhadap ancaman terorisme dilihat dari letak geografisnya, yang memberikan sumbangsih terhadap penyebaran militan yang dipermudah dengan penjagaan dank arena kebanyakan negara Asia Tenggara fokus terhadap banyaknya masalah konflik perbatasan.<sup>60</sup> Namun beberapa upaya sudah dilakukan ASEAN dalam mengentaskan terorisme, seperti:<sup>61</sup>

- 1) Menandatangani deklarasi bersama untuk memberantas terorisme (*ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*).
- 2) Menjalankan beberapa latihan perang.
- 3) Konferensi *ASEAN Chief of Police (ASEANAPOL)*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Winarno. 2014. *op.cit.* hal 181.

<sup>57</sup> Winarno. 2014. *op.cit.* hal 185.

- 4) Pertemuan Forum Regional ASEAN (ARF): pembekuan asset teroris, penerapan standar internasional, kerjasama dengan bertukar informasi dan lainnya
- 5) Melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat
- 6) ASEAN *Summit* ke-8: mengeluarkan deklarasi akan mendukung secara penuh seluruh tindakan yang akan dilakukan untuk memberantas terorisme.
- 7) Mengadopsi konvensi ASEAN untuk pemberantasan terorisme dalam *ASEAN Political Security Community Plan of Action*.

Masih ada beberapa lagi tindakan yang sudah dilakukan oleh ASEAN sebagai bentuk upaya pemberantasan terorisme. Peranan yang paling penting dipegang oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya, dengan alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Namun respon secara global juga diperlukan, secara masalah terorisme yang semakin meluas ini sudah menjadi perhatian tidak hanya satu pihak, satu negara, tetapi menjadi masalah bersama. Faktor tindakan terorisme kompleks, maka dari itu pencegahan harus langsung kepada akar dari terorisme tersebut dahulu, baru memberantas cabang-cabangnya. Memberantas terorisme tidak bisa dilakukan hanya oleh satu negara saja, namun butuh kerjasama dengan negara lain, kerjasama internasional dan secara global juga.

Isu terorisme sudah menjadi isu global yang sangat luas, dan tentu saja negara-negara bersiap untuk memberantas terorisme tersebut. Negara seperti Amerika, Uni Eropa, dan bahkan Asia Tenggara juga menggalakkan perang terhadap ISIS. Bahkan beberapa negara Arab sendiri juga mengajak Indonesia untuk bersatu di bawah payung negara Arab untuk segera memberantas terorisme. Kebanyakan memang cenderung menggunakan *hard power* dengan kekuatan militer. Dewan Keamanan PBB menyetujui dan mencanangkan resolusi untuk melipatgandakan aksi untuk melawan

ISIS – didorong dari peristiwa bom di Paris beberapa waktu lalu.<sup>62</sup> Resolusi 2249 tersebut mendesak seluruh anggota PBB untuk melakukan semua cara, semua langkah yang diperlukan dalam rangka perlawanan terhadap ISIS. Resolusi tersebut dicanangkan oleh Paris dan memberikan mandat untuk ‘menggandakan dan mengkoordinasikan semua upaya mereka untuk mencegah dan menekan serangan teroris.’<sup>63</sup> Termasuk juga untuk memberantas sarang-sarang ISIS terutama di Irak dan Suriah sendiri. Akan tetapi, resolusi tersebut tidak menyebutkan Bab VII Piagam PBB yang memungkinkan digunakannya kekuatan militer. Padahal, Prancis dan Rusia berpendapat bahwa aksi militer sudah bisa dibenarkan karena negara-negara berhak melindungi diri dari serangan.<sup>64</sup> NATO sendiri sudah bekerjasama dengan koalisi Islam dalam memerangi terorisme.<sup>65</sup> Tidak hanya NATO, namun APEC, Forum Regional ASEAN bidang Keamanan, beserta Dialog Kemitraan ASEAN juga turut berperan serta dengan beberapa badan intelejen juga.

#### 4. Kesimpulan

Sebagai isu yang meresahkan masyarakat, terorisme memang sudah sepantasnya segera diberantas, terlebih karena kita sendiri tidak akan pernah tahu secara persis gerakan-gerakan yang mereka ambil berikutnya. Maka dari itu butuh diplomasi yang baik untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien. Masalah Terorisme – dalam makalah ini, ISIS, sudah bukan

<sup>62</sup> BBC Indonesia. 2015. “Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi lawan ISIS,” dalam BBC Indonesia 21 November 2015. Tersedia dalam: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121\\_dunia\\_pbb\\_isis\\_resolusi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi)

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Fauzan Al-Rasyid. 2016. “Lawan ISIS, NATO Ingin Kerjasama dengan Koalisi Islam,” dalam RBTH Indonesia 7 April 2016. Tersedia dalam: [http://indonesia.rbth.com/news/2016/04/07/lawan-isis-nato-ingin-kerja-sama-dengan-koalisi-islam\\_582625](http://indonesia.rbth.com/news/2016/04/07/lawan-isis-nato-ingin-kerja-sama-dengan-koalisi-islam_582625)

merupakan isu lokal saja, namun sangat luas dan sudah mencakup kajian global. Aktor yang berperan di dalamnya juga tidak hanya negara saja yang dianggap bertanggungjawab. Di Indonesia, sudah menjadi tugas juga bagi Badan Intelijen Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Pemuka Agama, Tokoh masyarakat, Ketua adat, bahkan masyarakat awam sendiri penting untuk selalu waspada. Seluruh lapisan dalam masyarakat diharapkan untuk dapat teguh untuk saling bekerjasama, karena tanggungjawab akan keamanan nasional suatu negara, berada di tangan seluruh masyarakat dalam negeri itu sendiri. Kerjasama antarnegara juga dibutuhkan karena negara yang bergerak sendiri dikhawatirkan terlalu berat.

Diplomasi yang ditempuh adalah dengan Diplomasi *soft power* dengan pendekatan metodologi, sosial dan budaya karena dianggap lebih efektif daripada dengan *hard power*. Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah baru. Hal itu tidak akan merubah keadaan. Tindakan yang dilakukan Indonesia adalah tindakan preventif. Dengan berbagai peraturan dalam negeri dan juga memperkuat kerjasama di berbagai negara, Indonesia yakin mereka mampu mengatasi masalah ISIS yang dirasa mengkhawatirkan, apalagi diduga sudah mulai disisipi masuk melalui masjid dan pesantren. Untuk ke depannya, Indonesia diharapkan lebih siap, lebih sadar akan bahaya dari ancaman terorisme tersebut, juga cepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam perumusan kebijakan jika memang ternyata kebijakan yang sudah ada tidak atau kurang efisien.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Amstutz, Mark R. 1995. *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque: Brown and Benchmark.

- Baldwin, David A. 1997. *The Concept of Security*. British International Studies Association.
- Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear*. New York: Harvester Wheatsheaf
- Chomsky, Noam. 2006. *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. New York: Metropolitan Books.
- Crockatt, Richard. 1999. "The End of the Cold War" dalam John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Holsti, K.J. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Piliang. 2004. Dalam Hendropriyono. 2009. "Terorisme Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam." Jakarta: Kompas.
- Plano, Jack dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Pustaka Abidin
- Robertson, Ann E. 2007. *Terrorism and Global Security*. New York: Fact on File, INC
- Stiglitz, Joseph E. dan Linda J. Bilmes. 2008. *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*. New York: WW Norton & Company, Inc.
- Surya, Aelina. 2010. *Praktik Diplomasi Terpilih Pada Masa Perang Dingin*. Bandung: PT Kibar Internasional.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH "IBLAM
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. 1997. *International Relations and World Politics: Security Economy and Identity*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Weaver, Ole. 2007. *Still a Discipline After All These Debates?* dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (eds.) *International Relations Theories*,

- Discipline, and Diversity*. Oxford University Press.
- Wicaksana, I.G. Wahyu. 2007. *Epistemologi Politik Luar Negeri: "A Guide to Theory"*. Global & Strategis.
- William, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Gejayan, Jogjakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*)
- Tautan Elektronik**
- Al-Rasyid, Fauzan. 2016. "Lawan ISIS, NATO Ingin Kerjasama dengan Koalisi Islam," dalam RBTH Indonesia 7 April 2016. Tersedia dalam: [http://indonesia.rbth.com/news/2016/04/07/lawan-isis-nato-ingin-kerja-sama-dengan-koalisi-islam\\_582625](http://indonesia.rbth.com/news/2016/04/07/lawan-isis-nato-ingin-kerja-sama-dengan-koalisi-islam_582625).
- Alvin, Silvanus. 2015. "JK: Ikut ISIS, Kewarganegaraan Hilang," dalam Liputan6 18 Maret 2015. Tersedia dalam: <http://news.liputan6.com/read/2193061/jk-ikut-isis-kewarganegaraan-hilang>
- BBC Indonesia. 2015. "Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi lawan ISIS," dalam BBC Indonesia 21 November 2015. Tersedia dalam: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121\\_dunia\\_pbb\\_isis\\_resolusi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi)
- Gromico, Andrey. 2016. "Islam Moderat Dinilai Bisa Menangkal propaganda ISIS," dalam *Geotimes* 28 Januari 2016, tersedia dalam: <http://geotimes.co.id/islam-moderat-dinilai-bisa-menangkal-propaganda-isis/>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2014. Pada 25 September 2014. Tersedia dalam: <http://setkab.go.id/menlu-penyelesaian-kasus-isis-harus-komprehensif/>
- History. 9/11 Attack*. Tersedia: <http://www.history.com/topics/9-11-attacks>
- Intelejen Indonesia. "Ini Dia Upaya Polri Cegah Bibit ISIS di Indonesia," tersedia dalam: <https://www.intelijen.co.id/ini-dia-upaya-polri-cegah-bibit-isis-di-indonesia/>
- Joel, Bang. 2015. "Indonesia Tolak Perang dengan Negara ISIS Secara Kekerasan," tersedia dalam: <https://www.idjoel.com/indonesia-tolak-perang-dengan-negara-isis-dengan-kekerasan/>
- Marsudi, Retno L.P. 2015. "Diplomasi Indonesia akan Terkoneksi dengan Kepentingan Rakyat," dalam Tabloid Diplomasi Februari 2015. Tersedia dalam: <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/210-4-articles-februari-2015/1827-diplomasi-indonesia-akan-terkoneksi-dengan-kepentingan-rakyat.html>
- Munir, Saiful. 2015. "Beberapa Upaya BNPT Bentengi Indonesia dari Ancaman ISIS," dalam Sindonews 4 Desember 2015. Tersedia dalam: <http://nasional.sindonews.com/read/1066861/14/beberapa-upaya-bnpt-bentengi-indonesia-dari-ancaman-isis-1449228539>
- Poland, James M. 2005. *Understanding Terrorism: Groups, Strategies, and Response Second Edition*. Pearson Education, Inc.: Prentice Hall. akses online tersedia dalam: [http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2520/2580827/CJ330\\_Ch01.pdf](http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2520/2580827/CJ330_Ch01.pdf)
- Romadoni, Ahmad, 2016. "Komentar JK Soal 8 TKI di Korsel Terlibat ISIS," dalam Liputan6, 24 Mei 2016. Tersedia dalam: <http://news.liputan6.com/read/2514825/komentar-jk-soal-8-tki-di-korsel-terlibat-isis>
- Sukma, Rizal. 2003. "Keamanan Internasional Pasca 11 September 2001: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional" Makalah ini disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema 'Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan' yang

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Denpasar, 14-18 Juli 2003. Tersedia dalam: <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/keamanan%20Intl%20-%20rizal%20sukma.pdf>

Yani, Yanyan Mochamad. 2010. "Kemenangan Parta Demokrat dan Masa Depan Perang Global Melawan Terorisme," tersedia dalam: [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/kemenangan\\_partai\\_demokrat\\_dan\\_masa\\_depan.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/kemenangan_partai_demokrat_dan_masa_depan.pdf)